

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN INDONESIA  
DALAM TATA KELOLA OTONOMI DAERAH: STUDI KASUS DI  
KABUPATEN TANA TIDUNG, KALIMANTAN UTARA**

**R Ahmad Romadhoni Surya Putra<sup>1\*</sup>, Pipit Tita Adhitya<sup>1</sup>, Endy  
Triyannanto<sup>1</sup>, Zaenal Bachruddin<sup>1</sup>, I Gede Suparta Budisatria<sup>1</sup>,  
Nanung Agus Fitriyanto<sup>1</sup>, dan Ali Agus<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada  
Jl Fauna 3, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281

\*Korespondensi : ahmadromadhoni@ugm.ac.id

**ABSTRAK**

Peternakan berkontribusi sangat besar sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat. Selain sebagai salah satu cabang usaha di sektor pertanian, peternakan juga berfungsi sebagai penyedia sumber protein hewani asal hewan yang sangat diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, model pembangunan peternakan harus disusun dengan mendasarkan pada prinsip keberlanjutan. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan desain kerangka pembangunan peternakan nasional dalam implementasinya di tingkat daerah. Studi kasus di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara dipilih karena daerah tersebut merupakan daerah pemekaran sehingga diasumsikan membutuhkan arah kebijakan dalam pembangunan peternakan yang sesuai dengan potensinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini adalah proses kajian yang dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan data sekunder terkait dengan arah kebijakan pembangunan peternakan berkelanjutan. Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan yang ada pada tingkat provinsi dan pusat, telaah terhadap perda-perda terkait di tingkat kabupaten. Data sekunder dan hasil-hasil kajian lain menjadi bahan untuk proses analisis secara deskriptif kualitatif untuk memperkuat implikasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan peternakan suatu daerah harus memperhatikan isu-isu terkait otoritas veteriner, pemberdayaan peternak, pendampingan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan peternakan berbasis potensi daerah.

**Kata kunci:** Model Kebijakan, Pembangunan Peternakan, Otonomi Daerah, Pembangunan Berkelanjutan

***LIVESTOCK DEVELOPMENT POLICY OF INDONESIA'S  
DECENTRALIZATION: CASE STUDY IN TANA TIDUNG,  
KALIMANTAN UTARA PROVINCE***

R Ahmad Romadhoni Surya Putra<sup>1\*</sup>, Pipit Tita Adhitya<sup>1</sup>, Endy  
Triyannanto<sup>1</sup>, Zaenal Bachruddin<sup>1</sup>, I Gede Suparta Budisatria<sup>1</sup>, Nanung  
Agus Fitriyanto<sup>1</sup>, Ali Agus<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Animal Science Universitas Gadjah Mada  
Jl Fauna 3, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281

\*Corresponding Author: ahmadromadhoni@ugm.ac.id

***ABSTRACT***

*Livestock sector contribute to the income sources of society. As one of business in agriculture, livestock have role to provide animal protein food which is essential for human development in Indonesia. Therefore, livestock development policy should be designed to support the sustainability. This study aims to describe the conceptual framework of national livestock policy and its implementation at local government level. Case study was selected at Tana Tidung as new regency in a new province, Kalimantan Utara. It was assumed that the local government needs a direction to develop their livestock sector based on their potentials. Normative juridical method was applied in which we reviewed the policy from national to local level. Secondary data were used to support the qualitative descriptive analysis to strengthen the policy implications. The study suggests that the livestock development policy should consider issues of veterinary authority, farmer empowerment, business assistance, human resources development, and livestock research and development of the local potentials.*

*Keywords: policy model; livestock development; decentralization; sustainable development*

## PENDAHULUAN

Bidang Peternakan merupakan salah satu sektor yang strategis pada perekonomian Indonesia (BPS, 2016). Selain berkontribusi sangat besar sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, sektor peternakan berfungsi sebagai penyedia sumber protein hewani seperti daging, susu, dan telur. Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya gizi dan protein hewani, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap meningkatnya permintaan produk-produk peternakan. Namun demikian selain dampak positif, peternakan juga mempunyai dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik yaitu berupa pencemaran lingkungan baik udara, air, dan tanah yang diakibatkan oleh aktivitas peternakan.

Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007. Dengan luas wilayah keseluruhan sebesar  $\pm 4.828,58 \text{ km}^2$ , sekitar 52,3% penduduk di Kabupaten Tana Tidung mempunyai mata pencaharian utama di bidang pertanian (Tana Tidung dalam Angka, 2015). Jumlah ini tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2012 yang hanya berjumlah 44,8%. Dalam bidang peternakan, Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi untuk pengembangan ternak ruminansia besar utamanya sapi potong, ruminansia kecil yaitu kambing, ternak non ruminansia yaitu babi, ternak unggas utamanya ayam kampung, ayam pedaging dan itik. Meskipun jumlah populasinya cenderung fluktuatif namun ternak-ternak tersebut selalu mengalami peningkatan seiring dengan kecenderungan penurunan populasi pada ternak yang lain. Dari sisi produksi, produksi daging sapi di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2014 mencapai 24 ton dan produksi daging unggas, kambing/domba dan babi berturut-turut sebanyak 37,19; 0,54 dan 17,56 ton. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan peternakan, walaupun peningkatan populasi dan produksi daging belum optimal.

Pada era otonomi daerah, pembangunan di segala sektor dituntut untuk mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, upaya pembangunan peternakan juga harus mempertimbangkan dua hal tersebut. Sumber pendapatan asli daerah dapat diperoleh melalui retribusi ternak, baik dalam hal pemasukan, pengeluaran, maupun pemotongan ternak serta

retribusi lain terkait dengan usaha peternakan yang sedang berkembang. Sedangkan untuk pendapatan masyarakat, pembangunan peternakan harus diarahkan sesuai dengan potensi ternak secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kerangka implementasinya kebijakan pembangunan peternakan di dalam kerangka otonomi daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah berupa dokumentasi terhadap produk-produk hukum yang mendasari kebijakan peternakan untuk pembangunan peternakan di tingkat lokal. Dari kajian ini diharapkan didapat kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah khususnya dalam menyusun kebijakan pembangunan peternakan di daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan data sekunder. Studi pustaka yang dilakukan adalah melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sektor peternakan. Dari hasil telaah peraturan perundang-undangan maupun pustaka yang ada, kemudian dilakukan analisis untuk melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Data sekunder diperoleh dari pemerintah kabupaten, dinas Pertanian dan Kehutanan, data pusat statistik serta dinas-dinas terkait yang dapat mendukung analisis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara normative, hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pembangunan peternakan merujuk pada empat isu utama yaitu: kerangka dasar pembangunan peternakan, budidaya peternakan, infrastruktur peternakan dan konsumen produk peternakan. Telaah dari perundangan utama tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerangka Dasar Pembangunan Peternakan
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Budidaya Peternakan
  - Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Infrastruktur Peternakan
    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
    - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
    - Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  4. Konsumen Produk Peternakan
    - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Implementasi dari kebijakan perundang-undangan tersebut dalam kerangka otonomi daerah dapat merujuk pada kebijakan peternakan Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten tersebut memiliki sasaran jangka panjang pembangunan peternakan sebagai berikut: a) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak semestinya. Lebih lanjut di bidang peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Tana Tidung berusaha mengantisipasi permasalahan lapangan seperti: a) Terkendalinya penyembelihan ternak potong dan penyebaran daging yang tidak layak konsumsi oleh masyarakat, b) Terciptanya keserasian antara kebutuhan konsumsi protein hewani dengan daya dukung lingkungan, c) Tersusun rencana dan keterpaduan program-program pemenuhan kebutuhan akan protein hewani masyarakat melalui aktivitas peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung, d) Tercipta potensi pengembangan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan peternakan dan kesehatan hewan secara efektif, tepat guna dan hasil guna, e) Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Tana Tidung, f) Terkondisikannya pemenuhan akan protein hewani bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang berasal dari dalam kabupaten dan dari luar Kabupaten Tana Tidung (Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, 2016).

Sampai saat ini potensi komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Tana Tidung adalah sapi potong, ayam pedaging, dan babi. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 mengenai jumlah populasi ternak di Kabupaten

tana Tidung. Potensi pengembangan akan sangat terkait dengan sejauh mana permintaan di wilayah Tana Tidung maupun di daerah sekitarnya.

Data Populasi Ternak Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2015 sebagai berikut:

Komoditas Ternak	Jumlah Populasi (ekor)			
	2012	2013	2014	2015
Sapi Perah	-	-	-	-
Sapi Potong	984	971	950	1.049
Kerbau	-	-	-	-
Kambing	355	324	461	441
Domba	-	-	-	-
Babi	955	985	890	804
Kuda	-	-	-	-
Ayam Kampung	3.742	10.512	5.128	4.403
Ayam Pedaging	21.900	25.477	42.177	105.500
Ayam Petelur	-	-	-	-
Itik	1.905	1.907	2.220	1290

Sumber: BPS, 2015-2016 *cit.* Dinas Pertanian dan Kehutanan Tana Tidung

Permintaan produk komoditas peternakan dapat dilihat melalui pola konsumsi masyarakat. Dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi daging, susu, dan telur cenderung meningkat dari tahun 2012 sebesar Rp. 15.119 (4.19%) dari total pengeluaran untuk konsumsi per bulan), tahun 2013 sebesar Rp. 19.748 (5.04%), tahun 2014 sebesar Rp. 24.273 (4.49%), hingga tahun 2015 sebesar Rp. 33.484 (4.61%). Sementara itu, data konsumsi susu dan telur per kapita pada tahun 2012 sebesar Rp. 25.258 (7.01%), tahun 2013 sebesar Rp. 21.667 (5.52%), tahun 2014 sebesar Rp. 33.933 (6.57%), serta tahun 2015 sebesar Rp. 47.508 (6.54%) menunjukkan tren peningkatan (BPS, 2015-2016).

Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan ternak serta protein hewani di Kabupaten Tana Tidung adalah melalui manajemen budidaya peternakan yang baik, pengendalian penyembelihan ternak betina produktif, dan manajemen penyembelihan yang sehat dan bebas penyakit. Maka dalam implementasi kebijakan pembangunan peternakan, pemerintah kabupaten perlu untuk mengarahkan kebijakannya pada empat hal yaitu:

### 1. Otoritas Veteriner

Pemerintah perlu menetapkan otoritas veteriner dengan mengacu pada sistem kesehatan hewan nasional. Dalam pembagian wewenang dengan pemerintah pusat maka pemerintah daerah berkewajiban untuk

menetapkan dokter hewan yang berwenang untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi kesehatan hewan di daerah. Segala perizinan fungsi pelayanan kesehatan hewan dan hal-hal yang terkait harus melalui Bupati selaku kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung. Hal ini harus dilakukan untuk menjamin tersedianya hewan ternak yang sehat dan jaminan keamanan pangan dari produk-produk peternakan (Bahri, 2008).

## **2. Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan**

Pemerintah daerah perlu untuk mengintervensi kelembagaan pertanian dalam hal ini untuk melakukan pemberdayaan peternak di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak dan daya saing usaha peternakan (Suradisastra, 2017). Para peternak harus diberikan kemudahan dalam mengakses sumber permodalan, teknologi, informasi, pelayanan reproduksi dan kesehatan, dan bantuan-bantuan terkait teknis budidaya. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memfasilitasi peternak dalam pemasaran, penetapan kawasan peternakan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, penghindaran dari pengenaan biaya tinggi, serta pembinaan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang saling menguntungkan. Hal tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan peternak di Kabupaten Tana Tidung.

## **3. Pengembangan sumber daya manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang peternakan merupakan tulang punggung pembangunan peternakan di daerah. Mereka meliputi seluruh aparat pemerintah daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang pemerintah. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan peternakan maka pemerintah daerah berkewajiban untuk selalu meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan keterampilan, profesionalitas, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia. Peningkatan kualitas tersebut bisa melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam kerangka kelembagaan pemerintah (Bahri, 2008). Selain di wilayah budidaya, pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pendidikan konsumen terutama terkait dengan pemenuhan gizi keluarga dan konsumsi produk-produk peternakan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Dalam hal pengembangan sektor peternakan, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Penelitian dan pengembangan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan peternakan sebagai sumberdaya, komoditas, dan produk (Yusdja dan Ilham, 2006). Selain itu, hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan di sektor peternakan dan kesehatan hewan harus melingkupi semua aspek, baik aspek budidaya, pemasaran, perilaku konsumen, infrastruktur, maupun evaluasi kebijakan. Hal ini untuk menjamin kepastian usaha peternak sebagai motor penggerak pembangunan peternakan di Kabupaten Tana Tidung.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pada studi arah kebijakan pembangunan peternakan maka pembangunan peternakan pada era otomi daerah perlu mempertimbangkan: Pola manajemen peternakan dan kesehatan hewan yang terintegrasi dari perencanaan, budidaya, infrastruktur dan pelayanan konsumen dalam hal bidang penyediaan pangan asal hewan yang berasal dari hewan ternak. Untuk itu, pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Tana Tidung harus mendesain kebijakan yang dapat menjamin keberlanjutan sebuah proses pembangunan peternakan dengan melibatkan isu-isu sebagai berikut:

1. Pengendalian lalu lintas ternak sebagai upaya untuk mempertahankan populasi ternak melalui pengetatan izin dan pengawasan lalu lintas ternak guna memastikan kualitas ternak yang ada.
2. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pembangunan peternakan, seperti Rumah Potong Hewan (RPH) yang terpisah antara ternak unggas, ruminansia dan babi, Pasar Hewan, *check point* perbatasan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
3. Pengembangan kelembagaan peternak sebagai wahana untuk menaungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) usaha peternakan.
4. Peningkatan kualitas genetik guna meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Hal ini terscermin secara khusus pada kebijakan pengendalian pemotongan ternak betina produktif, Inseminasi Buatan (IB) untuk mendukung arah perkembangan agroindustri peternakan.



5. Keberadaan kawasan agropolitan untuk mendukung sektor peternakan terutama melalui penyediaan padang penggembalaan dan kebun hijauan pakan ternak untuk mensuplai kebutuhan ternak.
6. Perlindungan konsumen melalui penjaminan keterbukaan informasi terhadap produk-produk peternakan terutama dalam rangka menyediakan produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
7. Perlindungan usaha peternakan melalui mekanisme perizinan, penarikan retribusi, pengawasan, dan penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di dalam tata kelola otonomi daerah memerlukan dukungan payung hukum agar dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, disarankan kepada setiap pemerintah daerah untuk perlu menyusun sebuah peraturan daerah yang komprehensif tentang Peternakan dan Kesehatan Ternak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahri, S., 2008. Kebijakan dan strategi pengembangan ternak. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2008.
- BPS, 2015. Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka. BPS Kabupaten Tana Tidung.
- BPS, 2016. Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka. BPS Kabupaten Tana Tidung.
- Suradisastra, K. 2017. Revitalisasi Kelembagaan Untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Otonomi Daerah. *Analisis Kebijakan Pertanian* 4(4): 281-315.
- Yusdja, Y. dan Ilham, N., 2006. Arah kebijakan pembangunan peternakan rakyat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 4(1), pp.18-38.